

**STATUS HUKUM
JOINT OPERATING BODY:
PRAKTEK KERJA SAMA
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DI PT PERTAMINA (PERSERO)**

TESIS

**SARAH A. MONGAN
0606006665**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
SALEMBA, JAKARTA
JULI 2008**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : SARAH A. MONGAN
NPM : 0606006665
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : "Status Hukum Joint Operating Body:
Praktek Kerja Sama Pengusahaan Minyak
dan Gas Bumi di PT PERTAMINA
(PERSERO)"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H. (.....) 

Pengaji : Andjar Pachta Wirana, S.H., M.H. (.....) 

Pengaji : Ratih Lestarini, S.H., M.H. (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama
NPM**

**: SARAH A. MONGAN
: 0606006665**

**Tanda Tangan
Tanggal**


**:
: 24 Juli 2008**

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H., yang dalam banyak kegiatannya masih berkenan meluangkan waktu untuk membaca serta mendiskusikan draft-draft awal Tesis ini. Pemikiran beliau selalu membuat Penulis ingin terus memperdalam penelitian ini. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan Beliau;
2. Para Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bidang kekhususan Hukum Ekonomi (Sore) yang dalam pengajarannya banyak memberikan inspirasi hingga Penulis memberanikan diri untuk melakukan penelitian ini. Serta banyak memberikan pencerahan pemikiran akademis pada Penulis sehingga Penulis tidak hanya terkungkung pada kehidupan dunia hukum praktis;
3. Yang terutama, terima kasih untuk Suamiku tercinta Ori yang selalu dengan sabar dan penuh perhatian mendukung dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Serta tiga anak-anakku yang lucu, Reinha, Tobit dan Tara yang senantiasa memberikan kebahagiaan dan keceriaan saat Penulis mengalami *stag* pemikiran;
4. Untuk Bapakku J.S. Mongan, Ibuku Annie Patioran serta Bapak Mertua JB Suharto, serta Saudara-Saudaraku tercinta yang mendoakan Penulis agar lancar dalam kuliah;
5. Bapak Aji Prayudi dan Bapak Rijanto dari PT PERTAMINA (PERSERO) yang telah mendukung Penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga terasa sangat bermanfaat dalam peningkatan pengetahuan Penulis;

6. Rekan-rekan Penulis di PT PERTAMINA (PERSERO) Eva Maria, Ibu Rati Ernaeni, Bapak Supriyadi, Ibu Helmy Bahar, Cholid, Uky Moh. Masduky, Hollia Hudaya dan Jarrod D. Prastowo yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, membantu Penulis dalam penyelesaian Tesis ini;
7. Kawan-kawan angkatan-13 di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Ibu Helen, Soraya, Elly, Pak Kasdin, Benny dan Habibah, atas dukungan dan kebersamaannya dalam menjalani perkuliahan selama hampir 2 tahun;
8. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 24 Juli 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARAH A. MONGAN

NPM : 0606006665

Program Studi : Hukum Ekonomi

Departemen : -

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Status Hukum Joint Operating Body: Praktek Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di PT PERTAMINA (PERSERO)”,

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 2008
Yang menyatakan



(SARAH A. MONGAN)

ABSTRAK

Nama : SARAH A. MONGAN

Program Studi : Hukum Ekonomi

Judul : Status Hukum *Joint Operating Body*: Praktek Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di PT PERTAMINA (PERSE

Dalam pengusahaan migas, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain/kontraktor dalam bentuk *Joint Operating Body* (JOB) yang merupakan modifikasi dari konsep kontrak bagi hasil/*Production Sharing Contract* (PSC) yang dianut di Indonesia. Dalam JOB, PERTAMINA dan kontraktor masing-masing mempunyai *share* sama besar yakni 50:50 dan bersama-sama membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (komite operasi) untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak serta mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi dan melakukan pengawasan atasnya. Untuk memperlancar operasional JOB, pendiri JOB telah memberikan kewenangan penuh kepada JOB untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, memiliki kekayaan, mempekerjakan karyawan dan lainnya sehingga menempatkan JOB seolah-olah seperti sebuah subyek hukum. Namun dalam literatur hukum, JOB tidak dikenal sebagai subyek hukum/badan hukum dan oleh karenanya tidak dapat bertindak di muka pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, yang diuraikan lebih lanjut dalam Tesis ini. Oleh karenanya, walaupun kewenangan penuh telah diberikan kepada JOB oleh pendirinya, namun untuk bertindak di hadapan hukum tetap harus dilakukan sendiri oleh pendiri-pendiri JOB dan tidak diwakilkan oleh JOB. Melalui penulisan Tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait dalam JOB mengenai status hukum JOB agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Diharapkan pembahasan tersebut di atas akan membawa efisiensi serta peningkatan kinerja operasional JOB dalam mencapai target yang maksimal.

Kata Kunci:

JointOperating Body (JOB)

ABSTRACT

Name : SARAH A. MONGAN

Study Program: Economic Law

Title : Legal Status of *Joint Operating Body*: Cooperation Practice
In Oil and Gas Mining in PT PERTAMINA (PERSERO)

In oil and gas mining, it is possible for PERTAMINA as a State-Owned Company to enter into cooperation with other oil company/contractor in terms of *Joint Operating Body* (JOB) constituting modification of the *Production Sharing Contract* (PSC) concept adopted in Indonesia. In JOB, PERTAMINA and the contractor respectively has equal *share* namely 50:50 and jointly establishes a committee consisting of the representatives of PERTAMINA and contractor (operation committee) to lay down the basis of allocation of rights and obligations of either party as well as stipulate the procedure of operation implementation and its supervision. For smooth operation of JOB, JOB founder has conferred full authority upon the JOB to take corporate acts such as entering into agreement with other party, controlling assets, employing experts etc. thereby placing JOB as is it were a law subject. However law literature does not mention that JOB is a law subject/legal entity and consequently it has no authority to take any act before a court, as confirmed in the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 07/PK/N/1999 dated May 14, 1999, described further in this Thesis. Therefore, despite the full authority the founders conferred upon it, it is the JOB founders themselves, not represented to JOB, that must take any corporate act. May this Thesis writing able to provide clarity to the community especially those interested in JOB about the legal status of JOB and not render any loss to them in the future. Such discussion may bring about an efficiency as well as increase the performance of JOB operation in attaining the maximum target.

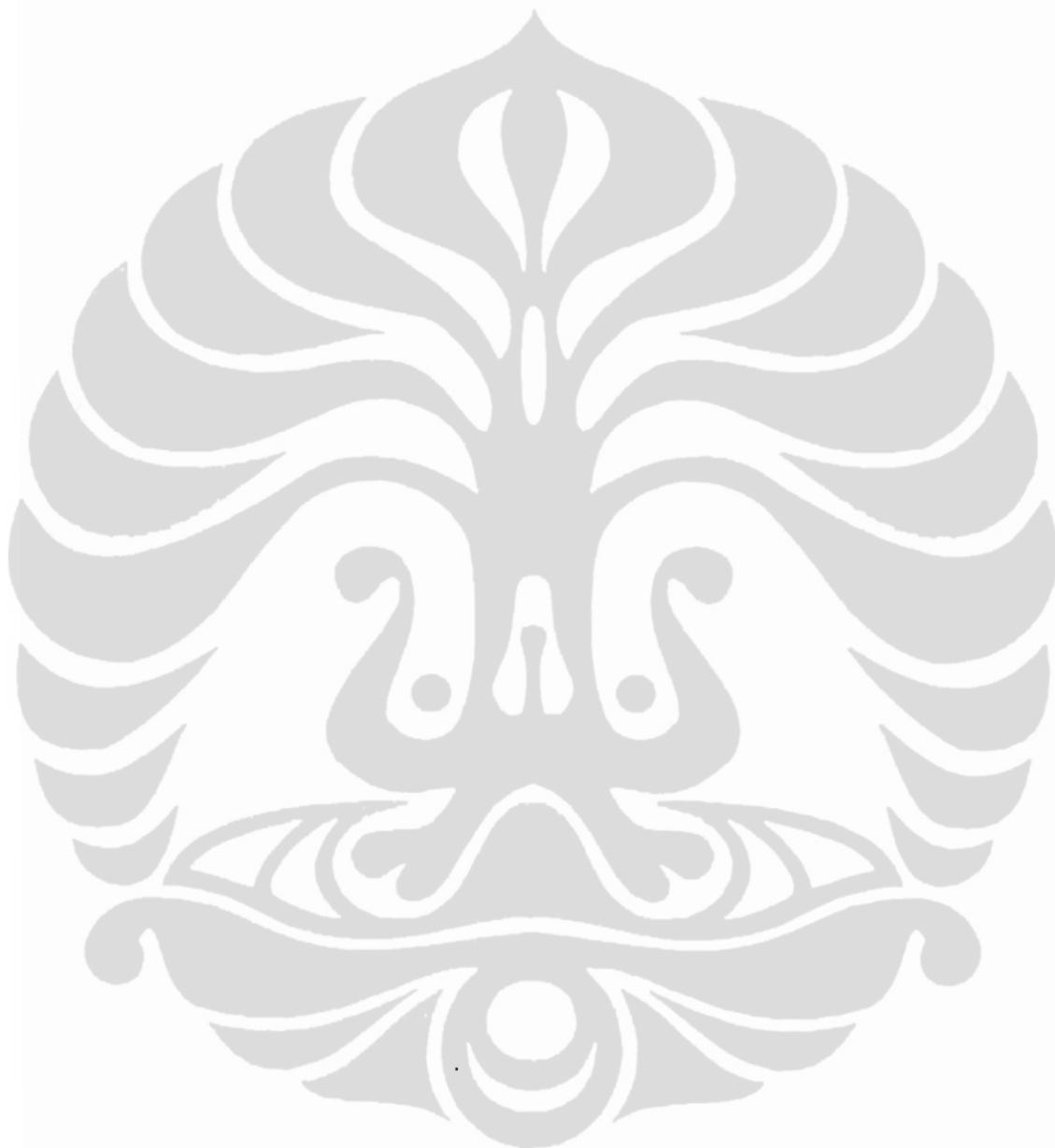
Key Word:

Joint Operating Body (JOB)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.4 Landasan Teori	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
2. LEMBAGA HUKUM PERDATA DAN BENTUK KERJA SAMA: PEMAHAMAN MENGENAI BENTUK <i>JOINT OPERATING BODY</i> (JOB)	12
2.1 Lembaga Hukum Perdata	12
2.1.1 Persekutuan Perdata	12
2.1.2 Firma	18
2.2 Bentuk-Bentuk Kerja Sama Internasional	19
2.2.1 Sindikasi	20
2.2.2 Konsorsium	20
2.2.3 <i>Joint Venture</i>	21
2.2.4 <i>State Contract</i>	23
2.3 JOB Sebagai Kontrak Kerja Sama Migas Di Indonesia	24
2.4 Perbandingan JOB Dengan Persekutuan Perdata	33
3. KONTRAK KERJA SAMA MIGAS DI INDONESIA	36
3.1 Landasan Hukum Kontrak Kerja Sama Migas	36
3.2 Bentuk-Bentuk Kontrak Kerja Sama Migas, Prinsip-Prinsip Serta Perbedaannya	42
4. PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNCUL DALAM KONTRAK JOB	56
4.1 Kontrak JOB	56
4.2 Analisa Permasalahan Hukum JOB	61
4.2.1 Kecakapan Bertindak JOB	61
4.2.2 Status Hukum JOB	64
4.3 Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999	66
4.4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004	73

4.5 Risiko Hukum Pihak-Pihak Dalam Kontrak JOB	77
5. KESIMPULAN DAN SARAN	80
DAFTAR REFERENSI	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 Tanggal 14 Mei 1999

Lampiran 2. Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 Tanggal 2 Februari 2006

